

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Program Makan Bergizi Gratis

Menurut Owen dan Rogers dalam Penelitian Astuti, (2014), program adalah serangkaian kegiatan atau intervensi yang dirancang secara sistematis untuk menghasilkan perubahan tertentu pada kelompok sasaran. Program tidak sekadar kumpulan aktivitas, tetapi merupakan proses terencana yang berangkat dari kebutuhan atau masalah yang ingin diselesaikan, memiliki tujuan yang jelas, serta melibatkan langkah-langkah yang saling berkaitan. Mereka menekankan bahwa program harus memiliki target penerima manfaat yang spesifik, logika hubungan antara input, aktivitas, output dan outcome yang dapat ditelusuri serta memungkinkan dilakukan evaluasi pada efektivitas dan dampaknya. Dengan demikian, dalam pandangan Owen dan Rogers, program merupakan suatu upaya terstruktur yang berorientasi pada perubahan dan dirancang agar hasilnya dapat diukur secara sistematis.

Program merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam implementasi kebijakan publik karena berfungsi sebagai bentuk operasional dari suatu kebijakan tersebut. Menurut Darmi (2018) implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, langkah yang dilakukan dengan cara langsung menerapkan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan

dengan terbentuknya perda dan kebijakan publik penjas atau peraturan pelaksanaan. Dalam penelitian Alifia (2016), Nugroho (2014) menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik terdapat dua langkah yang dapat dilakukan, yaitu mengimplementasikan kebijakan tersebut secara langsung dalam bentuk program-program atau melalui perumusan kebijakan turunan (derivat) yang selanjutnya diwujudkan dalam program. Pandangan ini menunjukkan bahwa program memiliki posisi sentral dalam proses implementasi kebijakan, karena kebijakan publik pada akhirnya akan diwujudkan dan dijalankan melalui program yang dirancang secara konkret.

Dalam praktik pelaksanaan kebijakan publik, program merupakan instrumen yang penting karena mampu menjembatani antara rumusan kebijakan yang bersifat normatif dengan tindakan nyata di lapangan yang memberikan dampak bagi masyarakat. Program dirancang sebagai rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari penetapan sasaran, pengalokasian sumber daya, hingga pelaksanaan dan evaluasi, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan sistematis. Perumusan dan pelaksanaan program yang jelas memungkinkan hubungan antara input, aktivitas, *output*, dan *outcome* dapat ditelusuri serta dievaluasi efektivitasnya dalam konteks sosial yang dinamis. Dalam hal ini, implementasi kebijakan melalui program mencerminkan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, sehingga kegiatan administratif dan teknis yang dilakukan tidak hanya ber-

sifat rutinitas, tetapi juga memberikan efek nyata bagi masyarakat sesuai dengan tujuan kebijakan publik itu sendiri (Gulo et al., 2024).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk konkret implementasi kebijakan publik yang menjembatani rumusan kebijakan dengan tindakan nyata di lapangan. MBG didefinisikan sebagai program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok sasaran seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan tujuan meningkatkan status gizi, mencegah stunting, serta mendukung kualitas sumber daya manusia. Program ini juga diarahkan untuk membentuk kebiasaan makan sehat dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan serta produktivitas Masyarakat (Kemendikdasmen, 2026). Selain itu, MBG tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai penyediaan pangan, sehingga menjadi kebijakan yang bersifat integratif antara peningkatan gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik dan administrasi, ruang lingkup program mencakup berbagai komponen yang dirancang secara sistematis dan terstruktur guna menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Program bukan hanya sekadar rangkaian kegiatan administratif, tetapi mencakup seluruh proses yang mendukung terwujudnya sasaran kebijakan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Menurut

Dunn (2004), terdapat empat komponen utama dalam cakupan program yang harus dijalankan oleh organisasi atau pemerintah, yaitu:

a) Perencanaan Program (*Program Planning*)

Tahapan awal yang melibatkan identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan penentuan sasaran program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas kebijakan. Pada tahap ini pula dirumuskan strategi, indikator keberhasilan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program secara menyeluruh.

b) Pelaksanaan Program (*Program Implementation*)

Proses penerapan seluruh rencana program ke dalam tindakan nyata di lapangan, yang mencakup mobilisasi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Pelaksanaan program menuntut koordinasi yang efektif antar unit pelaksana agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c) Pemantauan Program (*Program Monitoring*)

Tindakan pengawasan secara berkala terhadap jalannya program guna memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, dan standar yang telah ditentukan. Pemantauan juga berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini terhadap hambatan atau penyimpangan yang mungkin terjadi selama program berlangsung.

d) Evaluasi Program (*Program Evaluation*)

Fungsi penilaian secara sistematis terhadap relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak program yang telah dilaksanakan. Evaluasi

bertujuan untuk mengukur sejauh mana program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan bagi perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980)

George C. Edward III (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang menghubungkan keputusan atau kebijakan publik dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh para pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas isi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan para pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan yang efektif. Dengan demikian, suatu kebijakan yang telah disusun secara baik belum tentu menghasilkan tujuan yang diharapkan apabila proses implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya (Hildayanti et al., 2022).

Edward III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan sering kali menghadapi berbagai kondisi yang dapat mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Hambatan tersebut dapat berasal dari penyampaian informasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, maupun

struktur birokrasi yang belum mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan perlu dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan didukung oleh seluruh unsur yang terlibat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Menurut George C. Edward III (1980), terdapat empat variabel utama yang berdampak keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses implementasi kebijakan. Apabila salah satu variabel tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan sehingga tujuan kebijakan sulit diwujudkan secara optimal. Sebaliknya, apabila keempat variabel tersebut berjalan secara sinergis, implementasi kebijakan akan lebih efektif dan mampu memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Pramono, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, George C. Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam mengomunikasikan kebijakan, menyediakan sumber daya yang memadai, membangun komitmen pelaksana, serta menyelenggarakan sistem birokrasi yang efektif.

Keempat variabel tersebut menjadi dasar dalam menganalisis implementasi berbagai kebijakan publik karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat tercapainya tujuan kebijakan secara menyeluruh. Selanjutnya, masing-masing variabel akan diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan faktor pertama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, komunikasi adalah proses penyampaian informasi mengenai tujuan, isi, dan mekanisme kebijakan kepada para pelaksana maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Informasi yang disampaikan harus dapat dipahami dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan perbedaan persepsi sehingga tujuan kebijakan sulit dicapai. Edward III menjelaskan bahwa komunikasi terdiri atas tiga subindikator, yaitu *transmission*, *clarity*, dan *consistency*. Ketiga subindikator tersebut saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

- a. *Transmission* (Penyampaian Informasi) merupakan proses penyaluran informasi kebijakan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi harus dilakukan melalui saluran komunikasi yang tepat sehingga isi kebijakan

dapat diterima secara utuh oleh pelaksana maupun pihak yang terdampak. Apabila proses penyampaian informasi tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan akibat terjadinya kesalahpahaman.

- b. *Clarity* (Kejelasan Informasi) menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan harus disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kejelasan informasi akan memudahkan pelaksana dalam memahami tujuan, prosedur, serta ketentuan kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efektif.
- c. *Consistency* (Konsistensi Informasi) berarti informasi atau instruksi yang diberikan harus tetap dan tidak saling bertentangan. Konsistensi informasi akan menciptakan kesamaan pemahaman di antara para pelaksana sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara seragam sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Edward III, sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik, implementasi kebijakan tidak akan terlaksana secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang

dimaksud tidak hanya berkaitan dengan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup informasi, kewenangan, serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III membagi sumber daya ke dalam empat yaitu *staff*, *information*, *authority*, dan *facilities*.

- a. *Staff* (Staf) merupakan sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan kebijakan. Jumlah staf yang memadai serta kompetensi yang sesuai akan mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.
- b. *Information* (Informasi) merupakan informasi yang diperlukan oleh pelaksana mengenai prosedur, mekanisme, dan ketentuan pelaksanaan kebijakan sehingga pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. *Authority* (Wewenang) merupakan legitimasi atau kewenangan yang dimiliki pelaksana dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan. Wewenang yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan serta menghindari tumpang tindih tugas.
- d. *Facilities* (Fasilitas) merupakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti peralatan, anggaran, maupun infrastruktur. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa pelaksana yang memiliki komitmen tinggi akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila pelaksana tidak memiliki komitmen atau tidak mendukung kebijakan, maka implementasi kebijakan cenderung tidak berjalan secara optimal. Disposisi terdiri atas dua subindikator, yaitu *bureaucratic appointments dan incentives*.

- a. *Bureaucratic Appointment* (Pengangkatan Birokrasi) merupakan penempatan aparatur yang memiliki kemampuan, integritas, dan kompetensi sesuai dengan tugas yang diberikan sehingga mampu melaksanakan kebijakan secara efektif.
- b. *Incentives* (Insentif) merupakan pemberian penghargaan atau bentuk motivasi kepada pelaksana agar memiliki semangat dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan faktor yang berkaitan dengan susunan organisasi, pembagian tugas, mekanisme kerja, serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi antarorganisasi sehingga implementasi kebijakan dapat

berjalan lebih efektif. Sebaliknya, struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Edward III membagi struktur birokrasi menjadi dua subindikator, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *fragmentation*.

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP) merupakan pedoman atau prosedur operasional yang menjadi acuan bagi pelaksana dalam menjalankan kebijakan. SOP yang jelas akan menciptakan keseragaman tindakan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efektif.
- b. *Fragmentation* (Fragmentasi) merupakan pembagian tanggung jawab dan koordinasi antarunit atau organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik antarorganisasi akan mendukung keberhasilan implementasi, sedangkan fragmentasi yang tinggi tanpa koordinasi yang efektif dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

2.1.3 Dampak Program/Kebijakan

a. Pengertian

Dampak menurut OECD/DAC, (2019) memberikan pemahaman bahwa setiap kebijakan atau program menghasilkan serangkaian perubahan yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Dampak dipahami sebagai perubahan signifikan yang timbul baik secara positif maupun negatif, serta dapat berupa efek yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Pendekatan ini menekankan

bahwa kebijakan tidak hanya menghasilkan output atau outcome langsung, tetapi juga *higher-level effects* yang mencakup perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, kesejahteraan, maupun perubahan pada norma dan sistem yang lebih luas. Dampak tersebut dapat muncul secara bertahap dan sering kali didampaki oleh berbagai faktor eksternal seperti konteks sosial, respon masyarakat, dan dinamika pelaksanaan program.

Menurut Septiana et al., (2023) di dalam bukunya dampak kebijakan adalah perubahan kondisi sosial atau kondisi fisik sebagai akibat dari hasil suatu kebijakan. Dampak dalam suatu kebijakan pada masyarakat yang dituju, baik dampak yang diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi serta sejauh mana dampak tersebut berpotensi mengubah pola perilaku masyarakat yang dituju. Dampak kebijakan pada kelompok sasaran, apakah sesuai dengan harapan atau tidak dan dampak tersebut apakah efektif dalam mengubah perilaku masyarakat sebagai target yang dituju.

b. Jenis – Jenis Dampak

Thomas R. Dye (1981) mendefinisikan dampak kebijakan sebagai keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Lebih lanjut, dampak dapat dimaknai sebagai perubahan kondisi fisik ataupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan, serta akibat yang dihasilkan oleh suatu

intervensi program pada kelompok sasaran, baik akibat yang diharapkan maupun tidak diharapkan (Arfah, 2026). Menurut sebagian pakar (Dye, 1981 ; Anderson, 1984), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :

a) Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target.

Dampak kebijakan publik harus dianalisis berdasarkan kejelasan kelompok sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur. Penetapan tujuan kebijakan juga perlu menegaskan outcome yang ingin dicapai agar evaluasi dapat dilakukan secara sistematis. Ketika kebijakan menysasar lebih dari satu kelompok, kompleksitas analisis meningkat sehingga diperlukan penentuan prioritas dampak. Selain itu, setiap kebijakan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang diharapkan maupun tidak diharapkan, sehingga analisis harus mencakup keduanya secara komprehensif.

b) Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Fenomena ini dikenal sebagai efek eksternalitas atau *spillover*, yaitu kondisi di mana hasil (outcome) dari suatu kebijakan publik tidak hanya dirasakan oleh kelompok sasaran utama, tetapi juga berdampak pihak lain di luar target kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman

terhadap keseluruhan outcome kebijakan menjadi penting dalam kerangka analisis eksternalitas.

- c) Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa depan. Secara empiris, kebijakan IDT dan PPK menunjukkan dampak positif dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan serta mendorong kemandirian, khususnya pada masyarakat miskin dan secara lebih luas pada masyarakat umum. Dampak tersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan respons dan kesiapan masyarakat terhadap implementasi otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 1999 melalui berbagai regulasi terkait pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- d) Biaya langsung kebijakan merupakan pengeluaran yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya dan dana untuk pelaksanaan suatu program. Dalam praktiknya, berbagai lembaga pendanaan telah berkontribusi dalam merealisasikan program tersebut. Hal ini selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan yang didukung oleh berbagai pihak, seperti Bank Dunia, United Nations Development Programme, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- e) Biaya langsung kebijakan merujuk pada alokasi sumber daya dan dana yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan suatu program. Dalam implementasinya, pendanaan program

sering kali melibatkan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang didukung oleh aktor-aktor seperti Bank Dunia, United Nations Development Programme (UNDP), serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Nugroho (2003) memandang dampak kebijakan sebagai konsekuensi nyata dari pelaksanaan kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan publik karena berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu memberikan manfaat publik dan menjawab masalah yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, penilaian dampak tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi diarahkan pada perubahan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Berdasarkan pemikiran Riant Nugroho (2003), dampak kebijakan publik dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

a) Dampak kebijakan pada masalah publik.

Menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau menyelesaikan persoalan utama yang menjadi dasar perumusannya. Dampak kebijakan pada kelompok sasaran (*target groups*). Menggambarkan perubahan nyata yang dialami kelompok sasaran, baik dari sisi ekonomi, perilaku, maupun taraf hidup.

- b) Dampak kebijakan pada kelompok non-sasaran (*externalities*).
Menunjukkan adanya efek samping kebijakan yang dirasakan oleh pihak di luar sasaran utama, baik bersifat positif maupun negatif.
- c) Dampak jangka panjang dan keberlanjutan kebijakan. Menilai kemampuan kebijakan dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan tanpa menimbulkan masalah baru di masa depan.
- d) Dampak kemanfaatan nyata bagi publik (*public benefit*).
Menekankan bahwa keberhasilan kebijakan diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari capaian administratif.

2.1.4 Pendapatan

Pendapatan pedagang merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan usaha kecil, termasuk pedagang di lingkungan sekolah. Secara umum, pendapatan didampaki oleh beberapa faktor seperti modal, jam kerja, dan lama usaha. Menurut Djhon & Effendi (2025) menyatakan bahwa pendapatan pedagang di sekitar lingkungan pendidikan didampaki oleh modal dan waktu berdagang. Kondisi ini relevan dengan pedagang di lingkungan sekolah karena memiliki konsumen utama yaitu siswa dan tenaga pendidik.

Penelitian Apui et al., (2023) menjelaskan juga bahwa lokasi usaha dan jenis barang yang dijual juga memdampaki pendapatan pedagang kecil. Oleh karena itu, pedagang yang berjualan di tempat

strategis seperti kantin atau dekat gerbang sekolah cenderung memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selain faktor tersebut, pengelolaan pendapatan juga menjadi hal penting bagi pedagang. Berdasarkan penelitian Nikensari et al., (2019) pedagang UMKM umumnya masih menggunakan pencatatan sederhana dalam mengelola pendapatannya. Hal ini juga terjadi pada pedagang di lingkungan sekolah. Di sisi lain, pendapatan memiliki hubungan dengan kesejahteraan pedagang, dimana semakin tinggi pendapatan maka semakin baik kesejahteraan yang diperoleh. Dengan demikian, pendapatan pedagang di lingkungan sekolah didampaki oleh berbagai faktor usaha dan lingkungan, serta berperan penting dalam keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pedagang.

a. Jenis – Jenis Pendapatan

Menurut Raharja, (1999: 267) dalam penelitian Atun (2016) ada 2 jenis pendapatan

- a) Pendapatan kotor adalah pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya lain.
- b) Pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi pengeluaran dan biaya lain.

b. Indikator Pendapatan

Indikator-indikator peningkatan pendapatan menurut (Fitroh, 2019) meliputi antara lain:

1. Penghasilan yang diterima perbulan

Penghasilan setiap bulan adalah jumlah uang yang dihasilkan dalam satu bulan. Jumlah penghasilan setiap bulan biasanya didasarkan pada jumlah pendapatan yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, seperti tahun atau semester. Untuk menghitung penghasilan setiap bulan, pendapatan selama periode tertentu tersebut dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut.

2. Pekerjaan

Pekerjaan adalah cara utama bagi sebagian besar orang untuk menghasilkan pendapatan. Semakin banyak seseorang bekerja, semakin tinggi pula

3. Lama usaha

Lama pembukaan usaha dapat memdampaki tingkat pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan memdampaki produktivitasnya sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil daripada penjualan.

c. Sumber-Sumber Pendapatan

1. Gaji dan upah

Gaji dan upah merupakan bentuk kompensasi yang diterima seseorang sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

Pemberian imbalan ini dapat dihitung berdasarkan periode waktu, seperti harian, mingguan, maupun bulanan, tergantung pada jenis pekerjaan dan kesepakatan yang telah ditetapkan antara pekerja dan pemberi kerja menurut (Anwar & Ambarsari, 2017, hlm. 49) di dalam penelitian (Munawaroh, 2018).

2. Pendapatan dari Usaha Sendiri

Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang maupun yang lainnya. Adapun tenaga kerja keluarga serta nilai sewa kapital untuk diri sendiri tidak diperhitungkan.

3. Pendapatan dari Sumber Lain

Pendapatan dari usaha lain merupakan jenis pendapatan yang diperoleh tanpa keterlibatan langsung tenaga kerja dalam proses produksinya. Sumber pendapatan ini dapat berasal dari berbagai bentuk, seperti bantuan pemerintah, asuransi pengangguran, hasil penyewaan aset, sumbangan, maupun keuntungan dari kegiatan usaha tertentu. Tingkat pendapatan tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan atau standar hidup yang dapat dinikmati oleh individu atau keluarga, yang ditentukan oleh besarnya penghasilan serta sumber-sumber pendapatan lain yang dimiliki (Hanum, 2017, hlm. 76) dalam penelitian (Munawaroh, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Puspitasari et al., (2026)	Analisis Pemberian Program makan Bergizi Gratis (MBG) Terhadap Minat Belajar Dan Status Gizi Remaja Di SMP Negeri 3 Cikarang Selatan Tahun 2025.	Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pelaksanaan program MBG dengan peningkatan minat belajar serta kondisi status gizi siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain quasi eksperimen, dengan populasi sebanyak 398 siswa dan sampel sebanyak 80 siswa yang diambil menggunakan teknik simple random sampling. Peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner untuk mengukur minat belajar serta pengukuran status gizi menggunakan indeks massa tubuh, lingkar lengan, dan kuesioner FFQ, kemudian menganalisis data menggunakan uji Wilcoxon dan uji chi-square. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan program MBG dengan nilai p value 0,000 ($p < 0,005$), serta terdapat hubungan yang signifikan antara program MBG dengan status gizi remaja dengan nilai p value 0,007 ($p < 0,005$).
2	Zaenudin (2025)	Manfaat program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) Terhadap Kesehatan Dan Kosentrasi Belajar Siswa Di SMAN 1	Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap 250 siswa kelas X dan XI yang mengikuti program MBG. Peneliti mengumpulkan data melalui angket tertutup dengan skala Likert dan menganalisis data secara deskriptif kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program MBG memberikan dampak

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		Pembayaran.	positif terhadap kesehatan fisik siswa yang ditandai dengan peningkatan energi, daya tahan tubuh, serta penurunan frekuensi sakit. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa konsentrasi belajar siswa meningkat, yang terlihat dari tingginya skor fokus, daya tangkap materi, serta penurunan rasa kantuk saat pembelajaran berlangsung.
3	Irawan (2025)	Dampak Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Konsentrasi dan Motivasi Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar.	Penelitian tersebut menggunakan pendekatan mixed methods dengan melibatkan 40 siswa kelas V selama pelaksanaan program selama tiga bulan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan angket skala Likert, kemudian menganalisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program MBG berjalan efektif dengan tingkat partisipasi siswa mencapai 100% dan tingkat konsumsi sebesar 95%. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata skor konsentrasi belajar meningkat dari 3,25 menjadi 4,08 dan motivasi belajar meningkat dari 3,40 menjadi 4,22. Hasil uji korelasi juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara intensitas konsumsi MBG dengan konsentrasi ($r = 0,71$; $p = 0,001$) dan motivasi belajar ($r = 0,66$; $p = 0,002$), serta terjadi peningkatan nilai akademik siswa sebesar 10,2% setelah program berlangsung.
4.	Nurismalia et al., (2025)	Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap	bertujuan untuk menelaah sejauh mana program MBG berdampak terhadap peningkatan semangat dan fokus belajar siswa di sekolah dasar.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		Motivasi Dan Konsentrasi Belajar Peserta Didik	Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei, di mana pengumpulan data dilakukan melalui angket skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memberikan dampak positif terhadap motivasi dan konsentrasi belajar siswa, dengan rata-rata skor sebesar 4,30 dan persentase capaian sebesar 83,33% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa dimensi motivasi belajar memperoleh persentase 84,44% dan konsentrasi belajar sebesar 82,22%, sehingga program MBG dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar.

2.3 Variabel dan Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pelaksanaan Program MBG Terhadap Pendapatan Pedagang Kantin

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sedangkan variabel terikat adalah pendapatan pedagang kantin di sekolah Kota Bengkulu. Kedua variabel tersebut dipilih karena pelaksanaan Program MBG sebagai kebijakan publik diduga memberikan pengaruh terhadap

kondisi ekonomi pedagang kantin yang selama ini bergantung pada aktivitas konsumsi siswa di lingkungan sekolah.

Nugroho, (2003) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai proses pelaksanaan suatu kebijakan. Proses ini berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan berdampak pada masyarakat dengan berbagai cara, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik harus dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya keberhasilan pelaksanaannya tetapi juga dampak yang ditimbulkannya pada masyarakat yang terdampak. Dalam penelitian ini, penerapan Program Makan Bergizi Gratis dianggap sebagai kebijakan yang dapat mempengaruhi bisnis pedagang kantin sekolah.

George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa empat komponen utama memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Mereka adalah komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat komponen ini berhubungan satu sama lain untuk menentukan seberapa efektif pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teori Edwards III sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, karena teori ini dapat menjelaskan variabel yang memengaruhi

keberhasilan implementasi program di lingkungan sekolah (Cahyadie et al., 2024).

Menurut Fitroh, (2019) indikator-indikator peningkatan pendapatan meliputi penghasilan yang diterima per bulan, pekerjaan, dan lama usaha. Penghasilan yang diterima per bulan merupakan jumlah uang yang diperoleh pelaku usaha dari hasil kegiatan usahanya dalam satu bulan. Besarnya penghasilan tersebut mencerminkan tingkat penerimaan yang diperoleh selama periode tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan pendapatan yang terjadi. Pekerjaan merupakan aktivitas utama yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan. Semakin besar kesempatan dan intensitas seseorang dalam bekerja, maka semakin besar pula peluang memperoleh pendapatan. Sementara itu, lama usaha menunjukkan jangka waktu pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Semakin lama seorang pelaku usaha menekuni bidang usahanya, maka pengalaman, produktivitas, dan efisiensi dalam menjalankan usaha akan semakin meningkat sehingga mampu menekan biaya produksi dan berpotensi meningkatkan pendapatan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berdampak pada bisnis pedagang kantin. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya et al., (2026) menemukan bahwa Program MBG mengurangi permintaan

untuk makanan utama yang dijual di kantin, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas usaha pedagang dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi siswa setelah mendapatkan makanan sehat dari sekolah.

penelitian Khotimah et al., (2026) menunjukkan bahwa pendapatan pedagang kecil di sekitar sekolah menurun sebagai akibat dari pelaksanaan Program MBG. Dalam situasi seperti ini, pedagang dipaksa untuk mengubah diri mereka dengan berbagai cara, seperti mengembangkan produk baru, mengubah harga, dan menggunakan platform digital untuk mempertahankan bisnis mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya membantu kelompok sasaran tetapi juga dapat berdampak negatif pada ekonomi kelompok lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Temuan serupa disampaikan oleh Salsabillatuzzahra et al., (2025) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Program MBG mengurangi jumlah pembeli di kantin sekolah karena kebutuhan konsumsi siswa sebagian besar telah dipenuhi melalui program tersebut. Namun demikian, para pedagang menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi apabila diberikan kesempatan menjadi bagian dari pelaksanaan Program MBG. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha apabila dilaksanakan secara partisipatif.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980), teori pendapatan Fitroh, (2019), serta hasil penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis memiliki hubungan dengan pendapatan pedagang kantin sekolah. Implementasi kebijakan yang diukur melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpotensi memengaruhi pola konsumsi siswa. Perubahan pola konsumsi tersebut selanjutnya akan berdampak pada pendapatan per bulan, pekerjaan, dan lama usaha. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Program Makan Bergizi Gratis terhadap pendapatan pedagang kantin di sekolah Kota Bengkulu.



Gambar 2.1 Arah Hipotesis Penelitian

2.3.2 Hipotesis

Menurut Sugiono, (2023) hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis disusun berdasarkan landasan teori serta didukung oleh fakta empiris yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian, hipotesis berfungsi sebagai arah atau pedoman

agar proses penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terfokus. Dengan demikian, hipotesis tidak hanya sekadar perkiraan, tetapi merupakan bagian penting dari metode ilmiah yang disusun secara rasional, logis, dan dapat diuji secara objektif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

H₀ : Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Tidak Berdampak Terhadap Pendapatan Pedagang Kantin Sekolah

H_a : Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Berdampak Terhadap Pendapatan Pedagang Kantin Sekolah

